



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Provinsi Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut merupakan potensi dan modal yang besar untuk menyejahterakan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Namun perlu diingat, pengolahan potensi sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat pada saat ini dengan tidak mengorbankan kesempatan generasi di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhannya merupakan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan (*Brundtland Commission*, 1987). Hal ini dilakukan melalui proses pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat dibutuhkan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut.

5.1 VISI

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur harus menemukan relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Keseimbangan lima dimensi ini akan menjadikan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai jawaban bagi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Gambar 5.1
Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau



Sumber: Global Green Growth Institute, 2013

Kelima dimensi pertumbuhan ekonomi hijau diatas dapat didefinisikan sebagai berikut. Dimensi Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan menyoroti pentingnya keluaran ekonomi berkelanjutan (PDB). Ekonomi yang berkelanjutan sedemikian rupa menghasilkan pembangunan dan kemakmuran sosial secara luas. Pertumbuhan ini dapat melampaui model pembangunan industri yang dipelopori oleh negara maju yang mengeksploitasi sumberdaya dan tidak ramah lingkungan. Dimensi Ekosistem penyedia jasa yang berfungsi dan produktif menyoroti pertumbuhan yang menopang modal alam, terutama cadangan alam yang memasok aliran jasa ekosistem yang penting secara berkelanjutan. Cadangan ini seperti penyediaan air bersih, tanah yang subur, fungsi hutan yang terjaga. Daya dukung tersebut memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia tetapi sering diabaikan dalam pengambilan keputusan karena tidak dianggap sebagai pemakaian dalam produksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hijau berusaha mengatasi kegagalan pasar ini.

Dimensi selanjutnya adalah Pertumbuhan yang inklusif dan merata menyotori pertumbuhan untuk kepentingan rakyat, mereka yang berada didaerah perkotaan maupun pedesaan, yang kaya maupun yang terpingirkan. Dimensi ini merupakan tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi hijau, dan sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak mendapat manfaat dari intervensi pertumbuhan ekonomi hijau. Dimensi Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan menyoroti pertumbuhan yang membangun ketahanan ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan dan berkaitan dengan

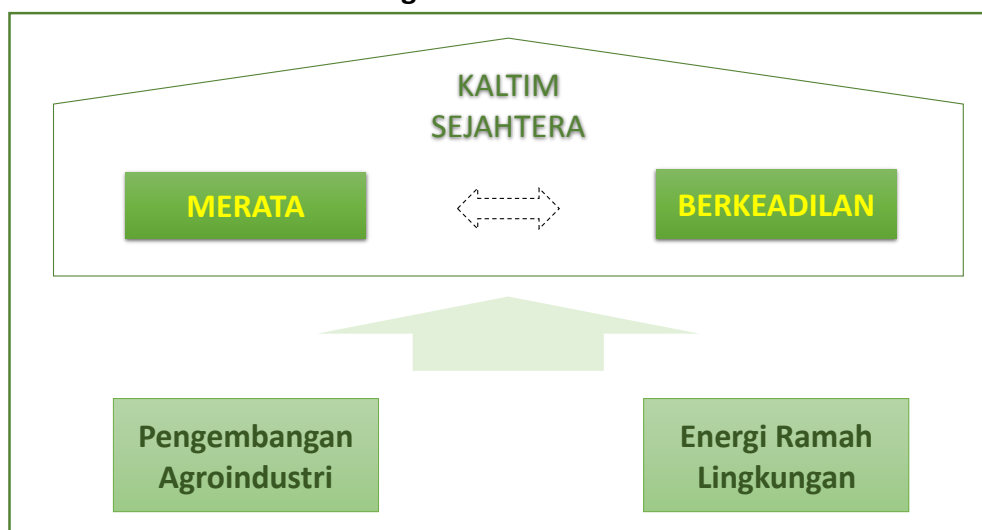
kemampuan sistem untuk menahan guncangan eksternal (misalnya beradaptasi dengan dampak fisik dari perubahan iklim, diversifikasi sektor ekonomi, ketahanan pangan, mata uang dan stabilitas perdagangan). Dimensi Penurunan emisi gas rumah kaca menyoroti pentingnya pertumbuhan rendah karbon untuk berkontribusi terhadap upaya global dan nasional untuk mitigasi perubahan iklim dan meminimalkan dampak negatif di masa depan terhadap masyarakat lokal dan internasional. Negara-negara dengan intensitas emisi GRK yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk penurunan emisi berbiaya hemat dan memiliki keperluan yang lebih mendesak untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Timur maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur ke depan ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN**

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan **Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan** yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada **pengembangan agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan** sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 5.2
Hubungan Antarelemen Visi



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan juga dapat dipandang sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya (Portes, 1976). Ini berarti bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen Visi Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan memandang lebih jauh dibanding aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling memengaruhi. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pembangunan daerah dengan pondasi ekonomi perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup.

Pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara utuh dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. Pembangunan sosial juga lebih diarahkan kepada peningkatan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi, pembangunan sosial Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai proses pembangunan yang terencana dan selaras dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Elemen Visi Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan berdasarkan data riil, kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 sebesar 74,52 dan meningkat menjadi 76,71 pada tahun 2012.

2. Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan

Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Fokus ini merupakan kebijakan yang diyakini dapat mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Timur **Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan**. Jika komitmen ini disinkronisasi, maka pembangunan lima tahun Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 1990 hingga saat ini, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur bergantung pada sumber daya tak terbarukan setelah selama kurang lebih 20 tahun (1970-1990) sektor kehutanan menjadi tulang punggung ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pergeseran basis sektor ekonomi terjadi pada tahun 90'an dimana sektor pertambangan mulai menjadi basis ekonomi wilayah menggantikan sektor kehutanan. Transformasi ini terjadi selain karena dimulainya eksploitasi tambang migas dan batubara secara masif, juga disebabkan karena semakin menipisnya potensi sumber daya hutan produksi akibat pemanfaatan yang tidak memerhatikan aspek keberlanjutan.

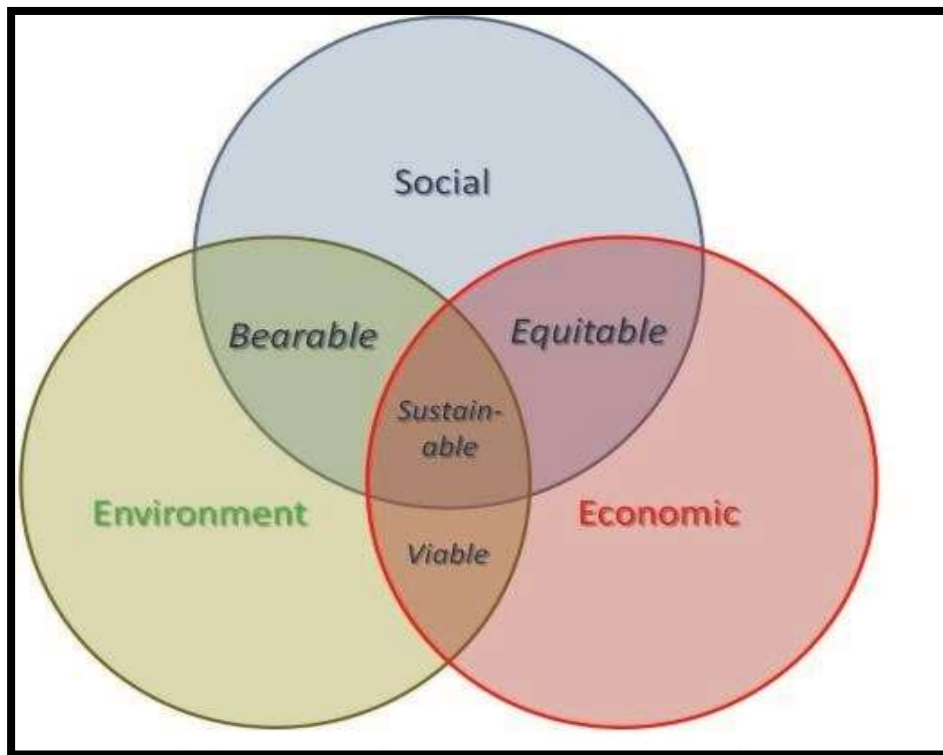
Pada periode 1990-2000, dimana sektor pertambangan migas, industri pengilangan minyak bumi dan gas alam cair, serta pertambangan batubara mulai mengambil alih dominasi ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan pada tahun 2001 kontribusi sektor pertambangan batubara terhadap PDRB meningkat tajam. Karena basis sektor ekonomi adalah sumber daya alam tak terbarukan maka seiring berjalannya waktu tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sektor tersebut relatif menurun. Meskipun begitu, pada periode 2000-2013 sektor tambang migas dan batubara masih menjadi andalan dalam pembentukan PDRB meskipun kontribusi pertambangan minyak dan gas bumi mulai menurun. Pergeseran tersebut secara otomatis juga diikuti dengan penurunan sektor industri pengolahan berbasis migas.

Kesalahan pengelolaan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan bukan saja menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan fluktuatif tetapi juga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Elemen Visi Provinsi Kalimantan Timur yang kedua yaitu **Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan** memiliki makna komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam tak terbarukan menjadi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Elemen visi ini merupakan tujuan sekaligus cara yang diyakini dapat mewujudkan elemen utama visi Provinsi Kalimantan Timur pertama yaitu **Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan** sebagai bagian dari implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Suatu credo dimana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masa kini tanpa mengorbankan kehidupan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kerangka tindak ini menekankan pada prinsip keadilan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan antara generasi sekarang dan yang akan datang sebagai falsafah dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai usaha untuk mencapai keseimbangan antara tiga jenis keberlanjutan yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5.3
Model Pembangunan Berkesinambungan



5.2 MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi

Misi kedua ini ditetapkan berdasarkan analisis terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak 40 tahun yang lalu dimana Provinsi Kalimantan Timur telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang sehat dan berkualitas.

Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor primer dan sekunder. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Dalam uraian sektor yang lebih rinci dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalan serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan antarwilayah adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Dari sisi ekonomi, kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tampaknya relatif tinggi. Hal ini terlihat pada angka PDRB per kapita di Penajam Paser Utara adalah yang terendah, yaitu Rp 26,9 juta sedangkan PDRB per kapita tertinggi di Bontang mencapai Rp 443,7 juta.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2006-2009 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif melebar sehingga perbedaan pendapatan antar individu juga semakin meningkat. Namun, sejak 2009 melalui pelaksanaan program-program pro-rakyat dan perhatian besar Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan infrastruktur di perbatasan dan pedalaman mengakibatkan angka indeks gini menjadi relatif stabil dan menurun, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini nasional.

Dalam konteks **mewujudkan daya saing ekonomi**, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan untuk menjamin pembangunan keberlanjutan.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat, serta peran koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Dalam konteks **energi terbarukan**, misi ini tidak terlepas dari cadangan migas, batubara, dan biomassa yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur serta penetapan tema pembangunan Koridor III Kalimantan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional dalam MP3EI. Hal ini selaras dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam upayanya melakukan transformasi Ekonomi. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada transformasi dari sektor primer ke struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Berkaitan dengan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong untuk pembangunan industri pengolahan hasil tambang di Provinsi Kalimantan Timur. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur akan

mengupayakan agar bahan galian mineral yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa energi dalam bentuk gas, liquid atau sebagai bahan baku industri petrokimia yang bernilai tambah tinggi.

3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Berdasarkan *Global Competitiveness Index* Tahun 2012, dari tiga hal utama yang menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, faktor dominan yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah pada dasarnya disebabkan oleh:

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Sebagaimana diketahui bahwa kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing masing kabupaten/kota sangat berbeda. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah yang mempunyai Kandungan cukup tinggi dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif lebih murah dibanding dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonominya.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksud disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan, dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pada daerah bersangkutan, demikian juga sebaliknya.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi pada suatu daerah tidak dapat dijual kepada daerah yang membutuhkan. Demikian halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja pada suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan.

d. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang dapat alokasi investasi lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 salah satunya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Untuk meningkatkan kemandapan jalan juga dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun jalan tol dan Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dikembangkan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di ibukota kecamatan.

Sebagai upaya pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian dilaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, dan Penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu :

- 1) Tidak ada korupsi
- 2) Tidak ada pelanggaran hukum
- 3) APBD baik
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
- 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

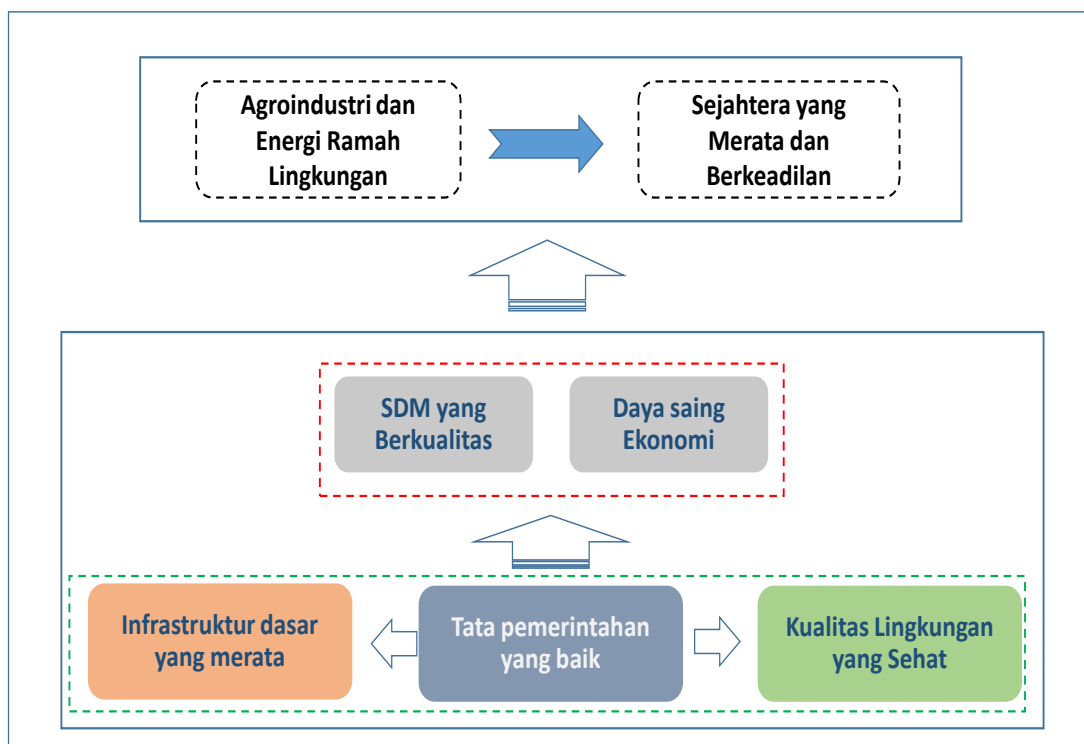
5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi biru melalui ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Keterhubungan antar misi dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 5.4
Hubungan Antarelelemen Visi dan Misi



Dari gambar tampak jelas bahwa begitu banyak permasalahan dan tantangan pembangunan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peran misi pembangunan yang dirumuskan dengan baik dapat memberi keyakinan bahwa visi RPJMD dapat dicapai dengan peningkatan SDM yang berkualitas dan daya saing ekonomi sebagai prasyarat penting tercapainya visi RPJMD. Untuk itu, sangat penting peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang merata ke segenap wilayah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Timur dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka arahan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim**
- 2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat**
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau**
- 4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas**
- 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**
- 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas, dan keberlanjutan kinerja pembangunan jangka panjang maka ditetapkan indikator makro pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

No	Indikator	Kondisi awal (2012)	Target 2018
1.	IPM	76,71	78,00
2.	Indeks Gini	0,36	0,32
3.	Tingkat Inflasi (%)	9,65	5,50 ± 1
4.	Tingkat Pengangguran (%)	8,90	5,11
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,06	5,00
6.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,59	4,70-5,30
7.	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	82,00

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

- **Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim**

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kita harus tetap meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka melek huruf. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2010 pemerintah telah mencanangkan program Wajib belajar 12 tahun. Program ini harus terus dilanjutkan dan dituntaskan agar anak-anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan dan lebih berdaya saing. Untuk itu, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas perlu dilengkapi di semua daerah terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Di samping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah telah mengembangkan 100 Puskesmas 24 jam selama kurun waktu 2009-2013 di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan program pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang agar usia harapan hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat dari 71,61 tahun pada 2012 menjadi 73 tahun pada 2018.

Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 78,00;**
- 2. Meningkatnya angka melek huruf menjadi 99,50%;**
- 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun;**
- 4. Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 73 tahun; dan**
- 5. Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp 54,65 juta.**

• **Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Mutu kesehatan masyarakat yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Timur juga harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selain aspek kesehatan, kurikulum pendidikan berbasis penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor

primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

1. **Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,00 %;**
2. **Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 5,11 %;**
3. **Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,32; dan**
4. **Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli sebesar Rp 807.823,- dengan tingkat inflasi 5,50 % \pm 1.**

• **Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau**

Pertumbuhan ekonomi hijau pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya melalui pengurangan emisi GRK, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, memberikan peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi. Peningkatan ekonomi hijau di Kalimantan timur ditekankan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan dan hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar 4,70-5,30 % (LPE migas) dan 8,30-8,90% (LPE non migas);**
2. **Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah sebesar 10,00 %;**
3. **Tercapainya swasembada pangan sebesar 100,00 %;**
4. **Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 3,00 %;**

• **Tujuan 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal

sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, **“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 7”**.

- **Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. **Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 7 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;**
2. **Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 85 (sangat baik); dan**
3. **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 80,00 (A) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”.**

- **Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Kualitas lingkungan hidup sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukung lingkungannya. Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 82,00; dan
2. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO₂/US \$juta PDRB menjadi 1.250 ton CO₂/US \$ juta PDRB.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

VISI: MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Satuan)	Kondisi awal (2013)	2014	2015	2016	2017	Target Akhir (2018)
Misi I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi								
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	76,71	77,01	77,14	77,28	77,42	78,00
	2. Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf (%)	98,30	98,40	98,50	98,60	98,80	99,50
	3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,60	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00
	4. Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	71,40	71,50	71,75	72,00	72,50	73,00
	5. Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita (juta rupiah)	44,65	46,65	48,65	50,65	52,65	54,65
Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan								
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	6. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6,06	6,00	5,75	5,35	5,15	5,00
	7. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	8,90	8,00	7,00	6,50	6,00	5,11
	8. Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	9,65	6,00±1	6,30±1	6,70±1	5,90±1	5,50±1
		Paritas daya beli/PPP (Rp)	649.850	698.622	724.450	751.237	779.016	807.823
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Indeks Gini	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32
		Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	1,59	2,3-3,2	3,2-3,7	3,6-4,3	4,2-4,8	4,7-5,3
		Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	5,17	5,5-6,3	7,0-7,3	7,7-8,3	8,0-8,7	8,3-8,9
		Pertumbuhan	7,47	7,2-7,9	7,7-8,0	7,6-8,2	7,8-8,4	8,2-8,6

		ekonomi non migas dan non batubara						
	11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	6,50	6,50	7,00	8,00	9,00	10,00
	12. Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	72,00	73,00	78,00	82,01	86,00	100,22
	13. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	0,02	0,62	1,12	1,62	2,12	3,00
Misi III : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata								
4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,00	5,50	6,00	6,50	6,80	7,00
Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik								
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	15. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	5,20	5,20	5,70	6,30	6,70	7,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	16. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 (baik)	70 (baik)	75 (baik)	80 (sangat baik)	83 (sangat baik)	85 (sangat baik)
	17. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	72,00 (B+)	74,00 (B+)	76,00 (B+)	78,00 (B+)	80,00 (A)
		Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Misi V : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim							
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	18. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	74,07	78,29	79,24	80,19	81,14	82,00
	19. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	1.500	1.498	1.458	1.350	1.300	1.250

Lima (5) misi, enam (6) tujuan, dan sembilan belas (19) sasaran/indikator kinerja pembangunan merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2013-2018. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai dengan bertahap, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur bersama kabupaten/kota di bawahnya.

5.4 SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk SKPD) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2014-2018 untuk beberapa indikator utama bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota

Target peningkatan IPM Kabupaten/Kota dalam lima tahun mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Trend kenaikan nilai IPM menurut komponen pembentuk IPM tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3
Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (kondisi awal)—2018

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal	Proyeksi IPM				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kota Samarinda	78,70	78,83	78,95	79,05	79,15	79,24
2. Kota Balikpapan	79,45	80,09	80,47	80,89	81,31	81,73
3. Kota Bontang	77,94	78,03	78,12	78,20	78,29	78,38
4. Kabupaten Berau	75,19	75,34	75,48	75,63	75,77	75,91
5. Kabupaten Paser	76,00	76,15	76,30	76,45	76,60	76,75
6. Kabupaten PPU	74,45	74,56	74,67	74,79	74,87	74,96
7. Kabupaten Kutai Barat	74,66	75,19	75,72	76,35	76,78	77,31
8. Kabupaten Kutai Timur	73,93	74,11	74,30	74,48	74,66	74,84

9. Kabupaten Kutai Kartanegara	74,80	75,37	75,94	76,57	77,20	77,83
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota dalam lima tahun mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018;
- (2) Distribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota berubah (lihat Tabel 5.3); dan
- (3) Kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2008-2012.

Tabel 5.4
Target Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas) Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (kondisi awal)-2018 (%)

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kota Samarinda	6,05	5,18	5,46	5,83	6,29	6,84
2. Kota Balikpapan	9,03	8,81	5,71	6,45	6,06	5,71
3. Kota Bontang	5,91	5,11	6,20	5,65	5,90	6,10
4. Kabupaten Berau	7,76	6,97	7,41	7,75	7,95	8,20
5. Kabupaten Paser	8,23	8,15	8,61	8,57	9,13	9,38
6. Kabupaten PPU						
7. Kabupaten Kutai Barat	7,00	7,01	7,03	7,06	6,95	6,99
8. Kabupaten Kutai Timur	9,80	10,02	10,27	10,49	10,55	10,89
9. Kabupaten Kutai Kartanegara	18,74	19,24	19,76	20,30	20,85	21,39

Target Pengurangan Pengangguran Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

Target pengurangan pengangguran Kabupaten/Kota 2013-2018 disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018;
- (2) Distribusi tenaga kerja menurut Kabupaten/Kota tidak berubah; dan
- (3) Pertumbuhan angkatan kerja baru menurut kabupaten/kota tahun 2008-2012.

Tabel 5.5
Target Pengangguran Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (kondisi awal)-2018 (%)

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal	Proyeksi Pengangguran				
		2014	2015	2016	2017	2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kota Samarinda	9,32	7,93	7,18	6,75	6,29	5,80
2. Kota Balikpapan	7,95	7,75	7,52	7,25	6,92	6,57
3. Kota Bontang	11,19	10,95	10,54	10,05	9,48	8,86
4. Kabupaten Berau	5,85	5,57	5,44	5,24	4,98	4,66
5. Kabupaten Paser	9,25	8,99	8,62	8,26	7,75	7,18
6. Kabupaten PPU	7,97	7,97	7,58	7,00	6,67	6,01
7. Kabupaten Kutai Barat	7,95	7,91	7,86	7,24	7,04	6,75
8. Kabupaten Kutai Timur	6,09	5,99	5,81	5,54	5,26	4,85
9. Kabupaten Kutai Kartanegara	7,62	7,37	7,12	6,47	5,81	5,16

Target Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018

Target pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota 2013-2018 disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pengurangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018;
- (2) Distribusi penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota sesuai dengan dinamika; dan
- (3) Kinerja pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2008-2012.

Tabel 5.6
Target Kemiskinan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (kondisi awal)-2018 (%)

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal	Proyeksi Kemiskinan				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kota Samarinda	3,77	3,52	3,25	3,11	3,05	3,02
2. Kota Balikpapan	2,87	2,68	2,51	2,34	2,17	2,02
3. Kota Bontang	6,71	6,29	5,89	5,52	5,16	4,82
4. Kabupaten Berau	5,84	5,45	5,09	4,74	4,41	4,10
5. Kabupaten Paser	8,90	8,40	7,91	7,45	7,01	6,60
6. Kabupaten PPU	9,76	9,51	8,87	8,17	7,88	7,18
7. Kabupaten Kutai Barat	7,59	7,06	6,52	5,98	5,65	5,31
8. Kabupaten Kutai Timur	10,84	10,12	9,44	8,80	8,20	7,63
9. Kabupaten Kutai Kartanegara	6,10	5,23	4,35	3,85	3,35	2,85